

KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK KAMPUS : KAJIAN KRITIS PERSPEKTIF FEMINISME

Risa Nisrina¹, Rahma Aulia², Muhammad Ammar Yazid³, Afiyata Nurhakiki⁴

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[1nisrinarisa5@gmail.com](mailto:nisrinarisa5@gmail.com), [2rahmaauliajee@gmail.com](mailto:rahmaauliajee@gmail.com),

[3ammaryazid195@gmail.com](mailto:ammaryazid195@gmail.com), [4afiyata.nurhakiki123qwe@gmail.com](mailto:afiyata.nurhakiki123qwe@gmail.com)

ABSTRACT

This study examines the dynamics of gender equality within campus politics by focusing on leadership, representation, and the experiences of women in student organizations. Using a descriptive qualitative approach, the research explores how social constructions, patriarchal culture, and representational practices shape power relations within student organizational spaces. The study employs Mary Wollstonecraft's classical feminist theory, Judith Butler's contemporary gender theory, and Stuart Hall's representation framework to identify forms of subordination, negotiation, and resistance experienced by women. The analysis draws on previous studies, journal articles, and empirical findings regarding women's political participation in higher education. The results indicate that women continue to face structural barriers such as masculine leadership stereotypes, gender-based division of labor, and limited institutional support. However, various studies show that women are able to establish more inclusive and participatory collaborative leadership patterns, playing an important role in strengthening democratic culture on campus. Furthermore, contemporary Islamic theological perspectives suggest that the principle of gender equality has strong normative foundations that support women's participation in public spaces. This study affirms the importance of organizational cultural transformation, the strengthening of gender-based political education, and the mainstreaming of feminist perspectives in order to create a campus political environment that is more equal, inclusive, and just for all students.

Keywords: Gender equality; Campus politics; Women's leadership

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika kesetaraan gender dalam konteks politik kampus dengan memfokuskan analisis pada kepemimpinan, representasi, serta pengalaman perempuan dalam organisasi mahasiswa. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana konstruksi sosial, budaya patriarki, dan praktik representasi membentuk relasi kuasa dalam ruang organisasi kemahasiswaan. Penelitian menggunakan teori feminism klasik Mary Wollstonecraft, teori gender kontemporer Judith Butler, serta kerangka representasi Stuart Hall untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk subordinasi, negosiasi, dan resistensi yang dialami perempuan. Data diambil dari berbagai studi terdahulu, artikel jurnal, serta temuan empiris mengenai partisipasi politik perempuan di perguruan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi

hambatan struktural seperti stereotip kepemimpinan maskulin, pembagian kerja berbasis gender, dan minimnya dukungan institusional. Meski demikian, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perempuan mampu membangun pola kepemimpinan kolaboratif yang lebih inklusif dan partisipatif, serta berperan penting dalam memperkuat kultur demokrasi kampus. Selain itu, perspektif teologis kontemporer dalam kajian Islam menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender memiliki landasan normatif yang kuat dan relevan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ruang publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi budaya organisasi, penguatan pendidikan politik gender, serta pengarusutamaan perspektif feminis agar politik kampus menjadi ruang yang lebih setara, inklusif, dan adil bagi seluruh mahasiswa.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Politik kampus, Kepemimpinan perempuan

A. Pendahuluan

Politik kampus merupakan ruang penting bagi pembentukan kepemimpinan mahasiswa dan pembelajaran demokrasi. Namun, partisipasi perempuan di ruang ini masih belum setara. Posisi strategis dalam organisasi kemahasiswaan sering kali didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan lebih banyak ditempatkan pada peran administratif atau pendukung (Suryani, 2022; Azizah & Tianah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa bias gender dan norma maskulinitas masih mengakar kuat dalam struktur politik kampus (Putri, 2020; Amanda, 2025).

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam menciptakan model kepemimpinan yang kolaboratif, demokratis, dan responsif. Hambatan yang mereka

hadapi mulai dari stereotip hingga dukungan struktural yang minim sering membuat partisipasi politik mereka tidak optimal (Amanda, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa politik kampus bukan hanya persoalan jabatan, tetapi juga arena reproduksi nilai, identitas, dan relasi kuasa (Hall, 1997).

Pendekatan feminism menjadi penting untuk membaca akar ketimpangan tersebut. Feminisme mengungkap bagaimana konstruksi sosial membatasi ruang gerak perempuan dan bagaimana perempuan melakukan resistensi melalui partisipasi aktif, negosiasi, dan pembentukan narasi tandingan (Asiah, 2023; Mernissi, 2011).

Dalam konteks ini, teori Mary Wollstonecraft memberikan kontribusi penting. Wollstonecraft menekankan bahwa kebebasan perempuan tidak

hanya berarti bebas dari dominasi laki-laki, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan rasionalitas, otonomi, dan kesadaran diri sebagai subjek moral yang setara (Wollstonecraft, 2015). Pemikirannya menyoroti pentingnya *positive liberty*, yaitu kebebasan yang memungkinkan perempuan menjadi agen aktif dalam lingkungan sosial mereka (Hirschmann & Regier, 2019). Gagasan ini relevan dengan politik kampus, karena ketimpangan representasi tidak hanya disebabkan oleh hambatan struktural, tetapi juga oleh sistem nilai yang membatasi peluang perempuan untuk mengekspresikan kapasitas kepemimpinan. Emansipasi, menurut Wollstonecraft, menuntut perubahan struktur sosial dan pendidikan agar perempuan dapat tampil sebagai pemimpin yang otonom (Panagakou, 2019).

Selain itu, kajian teologis kontemporer juga menegaskan bahwa kesetaraan gender memiliki dasar etis dalam nilai rahmatan lil-'alamin, martabat kemanusiaan, dan keadilan (Nur et al., 2024; Hidayati, 2023). Tafsir dan pemikiran modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki legitimasi untuk berpartisipasi

dalam ruang publik, termasuk politik kampus (Rahmawati, 2023; Naisr, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa meski terdapat kemajuan di sejumlah kampus, ketimpangan gender tetap muncul dalam bentuk resistensi simbolik, marginalisasi representasi, dan hambatan budaya (Toyibah, 2022; White et al., 2024). Dengan demikian, analisis politik kampus melalui feminism terutama melalui perspektif representasi dan kebebasan ala Wollstonecraft memberikan landasan kritis untuk memahami relasi kuasa serta merumuskan strategi untuk mewujudkan ruang politik kampus yang lebih inklusif, adil, dan setara bagi perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kritis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam fenomena ketimpangan gender dalam politik kampus melalui analisis wacana, konstruksi sosial, dan relasi kuasa yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan

untuk menggambarkan realitas partisipasi perempuan dalam politik kampus, sementara pendekatan kritis digunakan untuk membongkar struktur dan simbol yang melanggengkan bias gender.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian merujuk dari informasi para informan yang merupakan mahasiswa IAI AL-AZIS angkatan 10 yang pernah aktif dalam organisasi kampus. Informan secara konsisten menekankan bahwa kesetaraan gender dalam organisasi mahasiswa bukan sekadar slogan, melainkan sebuah prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Kesetaraan dipahami sebagai pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi, memimpin, dan mengambil keputusan. Mereka menolak pandangan bahwa jenis kelamin menjadi penentu kualitas kepemimpinan. Sebaliknya, ukuran yang dianggap relevan adalah kapasitas, komitmen, dan integritas. Penelitian ini menemukan bahwa para informan melihat ketidaksetaraan gender di ruang politik kampus masih muncul dalam bentuk halus, namun

nyata. Informan 1 menyampaikan bahwa perempuan "sering dianggap kurang tegas dan kurang cocok memimpin," meskipun memiliki kapasitas organisasi yang sama dengan laki-laki. Pernyataan ini menggambarkan bahwa persepsi stereotip masih menjadi hambatan utama bagi partisipasi politik perempuan di tingkat organisasi mahasiswa.

Informan 2 menambahkan bahwa bias gender sering hadir dalam cara perempuan diberi ruang berbicara di forum formal. Ia menyatakan, "Ketika perempuan menyampaikan pendapat, kadang dianggap terlalu emosional," sehingga suara perempuan sering diremehkan. Kasus ini menggambarkan bentuk ketidaksetaraan berbasis persepsi emosionalitas, yang secara sosial sering dilekatkan kepada perempuan. Berbeda dari dua informan pertama, Informan 3 sebagai mahasiswa laki-laki memberikan perspektif bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya dirasakan perempuan, tetapi juga disadari oleh sebagian laki-laki yang peka terhadap dinamika tersebut. Ia mengatakan, "Teman-teman perempuan sebenarnya aktif, tapi kadang dicut saat rapat, itu memang

sering terjadi." Pengakuan ini menunjukkan bahwa bias struktural tidak selalu berupa larangan eksplisit, tetapi hadir sebagai praktik sehari-hari yang meminggirkan suara perempuan.

Informan 4 menegaskan bahwa ketimpangan sering muncul dalam bentuk pembatasan peran. Menurutnya, "Perempuan sering diarahkan ke posisi sekretaris atau bendahara, jarang dipertimbangkan jadi ketua." Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam organisasi masih dipengaruhi norma gender tradisional, yang menempatkan perempuan pada posisi administratif daripada strategis.

Temuan mengenai ketidaksetaraan gender dalam politik kampus juga diperkuat oleh dua informan laki-laki, yaitu Informan 5 dan Informan 6, yang memberikan perspektif reflektif terhadap dinamika relasi gender di organisasi mahasiswa. Informan 5 menjelaskan bahwa dalam pengalaman forum organisasi, ia sering melihat mahasiswa perempuan "cenderung menahan pendapat karena takut disalahpahami atau dianggap terlalu emosional," sehingga membuat mereka tampak pasif bukan karena

kurang kompeten, tetapi karena suasana forum belum sepenuhnya nyaman bagi mereka untuk mengekspresikan pendapat secara bebas. Sementara itu, Informan 6 mengakui bahwa sebagian mahasiswa laki-laki masih membawa anggapan tradisional, misalnya menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap "lebih cocok untuk bagian administrasi karena rapi dan teliti," sedangkan posisi strategis dalam pengambilan keputusan lebih sering dipersepsikan sebagai ruang laki-laki. Kedua informan laki-laki ini memperlihatkan bahwa bias gender bukan hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga diakui oleh laki-laki sebagai bagian dari budaya kampus yang belum sepenuhnya egaliter. Pengakuan ini memperkuat temuan utama bahwa ketimpangan dalam politik kampus bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan pola struktural yang mempengaruhi cara perempuan diposisikan dan memposisikan diri dalam ruang kepemimpinan.

Keempat temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender di politik kampus bukan disebabkan oleh aturan formal organisasi, melainkan

oleh budaya organisasi yang masih menyimpan asumsi mengenai kemampuan dan peran perempuan. Mayoritas informan mengenal feminism sebagai gerakan sosial dan cara pandang yang menolak ketidakadilan gender dan memperjuangkan kesetaraan. Mereka menekankan bahwa feminism bukanlah upaya untuk menyingkirkan laki-laki, melainkan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks kampus, feminism dipandang relevan karena masih ada stereotip bahwa perempuan kurang pantas menjadi pemimpin. Dengan adanya pendekatan feminism, perempuan didorong untuk lebih berani tampil, bersuara, dan menegaskan kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa feminism telah diinternalisasi sebagai alat kesadaran kritis di lingkungan mahasiswa. Ketimpangan muncul dalam bentuk stereotip, pembatasan peran, interupsi dalam forum, dan delegitimasi suara perempuan. Realitas ini memberikan dasar kuat untuk mengaitkannya dengan teori feminism dan teologi

Islam yang memandang manusia setara di hadapan nilai kemanusiaan. Jika dilihat dari perspektif feminism Mary Wollstonecraft, temuan lapangan ini sangat relevan. Wollstonecraft menolak pandangan yang merendahkan perempuan sebagai makhluk emosional dan tidak rasional. Ia berargumen bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang sama dengan laki-laki apabila diberi kesempatan yang setara. Pernyataan Informan 1 bahwa perempuan dianggap "kurang tegas" serta penilaian Informan 2 bahwa perempuan dianggap "terlalu emosional" mencerminkan bentuk bias yang sejak lama dikritik Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman*.

Lebih jauh, stereotip bahwa perempuan lebih cocok menjadi sekretaris atau bendahara seperti disampaikan informan 4 selaras dengan kritik Wollstonecraft mengenai pembatasan peran perempuan dalam ranah publik. Dalam kerangka feminism liberal yang ia anut, pembagian peran berbasis gender dianggap sebagai konstruksi sosial yang dapat dibongkar melalui pendidikan dan perubahan budaya organisasi. Dalam konteks kampus,

hal ini menunjukkan perlunya menciptakan ruang politik yang memberikan kesempatan sama bagi perempuan untuk memimpin.

Dalam perspektif teologi Islam, ketidaksetaraan yang ditemukan bertentangan dengan prinsip *karamah insaniyah* (martabat manusia) yang menegaskan bahwa setiap manusia dimuliakan tanpa membedakan jenis kelamin. Al-Qur'an menegaskan, "Sungguh Kami telah memuliakan anak Adam" (QS. Al-Isra: 70). Ketika suara perempuan diremehkan atau diinterupsi seperti yang disampaikan Informan 3, maka praktik tersebut secara implisit mengingkari martabat yang melekat pada setiap individu. Informan menilai bahwa Islam pada dasarnya mendukung partisipasi perempuan dalam politik kampus, selama dilakukan dengan niat baik dan menjaga adab. Mereka merujuk pada sejarah Islam yang menghadirkan tokoh-tokoh perempuan berpengaruh, seperti Khadijah dan Aisyah, sebagai bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ruang publik.

Nilai *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam menekankan pentingnya interaksi yang adil, saling menghormati, dan tidak merendahkan

satu sama lain. Ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam politik kampus menunjukkan absennya nilai *rahmah* dalam budaya organisasi. Forum organisasi seharusnya menjadi ruang dialog yang inklusif, bukan arena dominasi yang melemahkan kontribusi perempuan.

Prinsip *ta'dil* (keadilan) memberi kerangka normatif bahwa setiap orang harus diperlakukan setara dalam kesempatan berpartisipasi. Ketika perempuan diletakkan pada peran tertentu karena stereotip gender, hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang dijunjung dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara nilai teologis Islam dan praktik politik kampus. Analisis feminism Wollstonecraft dan nilai *rahmah*, *karamah insaniyah*, *ta'dil* memberikan dasar kuat bahwa ketidaksetaraan gender di politik kampus merupakan problem struktural yang perlu ditangani lewat perubahan budaya organisasi dan perspektif yang lebih egaliter.

Sebagian besar informan merasakan bahwa ruang politik kampus masih cenderung maskulin. Walaupun secara aturan semua

mahasiswa memiliki kesempatan yang sama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam diskusi, rapat, maupun pencalonan. Perempuan sering menghadapi stereotip seperti dianggap "kurang tegas" atau "emosional". Namun, ada juga informan yang melihat tren positif yakni, semakin banyak perempuan yang berani mencalonkan diri dan mengambil posisi strategis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran budaya meskipun belum sepenuhnya setara.

Motivasi informan untuk terlibat dalam organisasi kampus sangat beragam, mulai dari pengembangan diri, melatih kepemimpinan, memperluas relasi, hingga membuktikan kapasitas perempuan. Ada juga motivasi idealis, yaitu ingin membangun kampus yang lebih adil dan inklusif. Beberapa informan menekankan bahwa keterlibatan mereka bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial di lingkungan kampus. Beberapa mengikuti organisasi karena ajakan teman, sementara yang lain merasa tertarik sejak awal. Informan 1 menyebut bahwa ia bergabung karena

ingin memahami dinamika organisasi, sedangkan Informan 2 mengatakan bahwa ia awalnya hanya ikut-ikut teman sebelum akhirnya nyaman berproses. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi keterlibatan politik kampus bersifat situasional dan berlapis.

Informan menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi stereotip gender. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam ruang politik kampus. Menurut Informan 1, salah satu bentuk strategi yang sering digunakan adalah "menegaskan kemampuan diri lewat performa kerja," terutama ketika perempuan menghadapi keraguan dari rekan laki-laki. Strategi ini muncul karena sebagian perempuan merasa harus membuktikan diri dua kali lebih keras sebelum pendapat mereka mendapat perhatian yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bergantung pada formalitas struktur organisasi, tetapi juga menggunakan kualitas kerja sebagai alat negosiasi sosial.

Di sisi lain, Informan 2 menekankan pentingnya strategi

komunikasi yang lebih terencana. Ia menyebut bahwa perempuan "lebih memilih menyampaikan pendapat dalam forum kecil atau lewat diskusi personal terlebih dulu," sebelum membawanya ke rapat besar. Langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi resistensi atau pengabaian ketika mengangkat isu yang dianggap sensitif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perempuan menggunakan taktik komunikasi yang memadukan kehati-hatian dengan ketegasan, dan hal ini menjadi bagian dari strategi survival dalam ruang politik yang masih bias gender.

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan strategi lain yang cukup efektif, yaitu memperkuat solidaritas antarperempuan. Ia menyebut bahwa dirinya "lebih percaya diri menyuarakan pendapat ketika ada teman perempuan lain yang mendukung," sebab dukungan tersebut membuat posisi mereka lebih kuat di hadapan forum yang didominasi laki-laki. Strategi berbasis solidaritas ini mencerminkan pola gerakan feminis kolektif, di mana keberanian dan daya tawar meningkat melalui persatuan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa perempuan tidak berjuang secara individual, melainkan

melalui jaringan emosional dan sosial yang saling menguatkan. Dukungan dari teman, dosen, dan lembaga kampus memang ada, tetapi sifatnya tidak merata. Sebagian dosen sangat terbuka dan mendorong kepemimpinan perempuan, sementara sebagian mahasiswa masih membawa pandangan tradisional. Informan menilai bahwa dukungan sosial sangat penting untuk memperkuat keberanian perempuan tampil. Dukungan ini menjadi modal sosial yang membantu perempuan menghadapi hambatan budaya.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Informan 4, yang menyebut strategi berupa "mengetahui batas situasi dan membaca atmosfer forum" sebelum berbicara. Menurutnya, membaca suasana adalah cara penting untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan memastikan pendapatnya tidak langsung ditolak. Strategi ini memperlihatkan kecerdasan emosional perempuan dalam menavigasi dinamika organisasi, sekaligus memperlihatkan bahwa perjuangan kesetaraan tidak selalu dilakukan melalui konfrontasi langsung, melainkan melalui negosiasi konteks yang cermat.

Selain strategi personal, beberapa informan juga menggunakan strategi struktural. Informan 5, misalnya, menyebut bahwa dirinya melihat perempuan sering “mengambil peran-peran fungsional untuk menunjukkan kapabilitas,” seperti menjadi koordinator program atau penanggung jawab kegiatan yang menuntut ketelitian dan manajemen. Walaupun awalnya dianggap sebagai beban, posisi ini kemudian menjadi bukti kapasitas kepemimpinan perempuan yang pada akhirnya membuat suara mereka lebih diperhitungkan dalam rapat strategis. Pola ini menunjukkan bahwa perempuan memanfaatkan ruang-ruang kerja sebagai pintu masuk menuju ruang pengambilan keputusan.

Dari perspektif laki-laki, Informan 6 menambahkan bahwa sebagian perempuan memilih strategi “lebih vokal dalam advokasi isu tertentu,” seperti program sosial, pendidikan, atau pemberdayaan mahasiswa, yang secara budaya dianggap lebih “sesuai” untuk perempuan. Namun, menurutnya, pola ini justru menjadi langkah efektif untuk menunjukkan bahwa

perempuan memiliki kompetensi dalam isu-isu struktural kampus. Pandangan Informan 6 mengonfirmasi bahwa strategi perempuan sering kali dipengaruhi oleh persepsi sosial terhadap peran yang “tepat,” tetapi kemudian dibalik menjadi alat pemberdayaan.

Jika dianalisis melalui perspektif teori feminism Mary Wollstonecraft, strategi-strategi ini mencerminkan bentuk *rational self-assertion* (penegasan diri secara rasional). Wollstonecraft menekankan bahwa perempuan harus mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan intelektual dan moral mereka. Strategi menegaskan kompetensi yang disebut Informan 1 dan Informan 3 sangat sejalan dengan gagasan Wollstonecraft bahwa perempuan layak berdiri sejajar dengan laki-laki melalui pembuktian kapasitas, bukan melalui stereotipe yang melemahkan. Dalam konteks teologi Islam, strategi mahasiswa perempuan juga dapat dibaca melalui nilai *rahmah* (welas asih), yaitu keberanian menunjukkan suara tanpa menghilangkan etika dan kelembutan dalam menyampaikan pendapat. Pendekatan Informan 2 dan Informan 4 yang mengutamakan

komunikasi persuasif mencerminkan *rahmah* sebagai prinsip dialogis, memperjuangkan keadilan dengan cara yang tetap menghormati keharmonisan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan menggunakan strategi yang bukan hanya efektif secara sosial, tetapi juga selaras dengan nilai etika dalam Islam.

Selain itu, strategi perempuan untuk memperjuangkan posisi mereka dalam politik kampus juga mencerminkan konsep *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Ketika Informan 3 menekankan pentingnya solidaritas dan Informan 5 menunjukkan bagaimana perempuan mengambil peran strategis untuk membuktikan kemampuan, keduanya menggambarkan upaya mempertahankan martabat sebagai manusia yang sama-sama memiliki hak untuk berpendapat dan memimpin. Tidak ada hierarki gender dalam prinsip karamah, dan strategi yang mereka gunakan adalah bentuk afirmasi terhadap nilai tersebut.

Akhirnya, strategi-strategi yang dilakukan mahasiswa perempuan juga memiliki keselarasan dengan prinsip *ta'dil* (keadilan). Ketika perempuan menegosiasikan posisi mereka di

ruang organisasi, mempertahankan suara, atau membentuk dukungan kolektif, mereka sedang mengupayakan distribusi kekuasaan yang lebih adil dalam politik kampus. Temuan dari Informan 1 hingga Informan 6 menunjukkan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya respons terhadap bias, tetapi juga bagian dari upaya struktural untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, strategi mereka bukan sekadar adaptasi, tetapi merupakan kontribusi nyata terhadap perubahan budaya politik kampus yang lebih egaliter.

Sistem pemilihan kampus secara formal sudah inklusif gender dan tidak membatasi perempuan untuk mencalonkan diri. Representasi perempuan dalam kepemimpinan juga mulai meningkat, meski belum seimbang dengan laki-laki. Perempuan semakin aktif, vokal, dan berperan dalam pengambilan keputusan. Namun, pada praktiknya mereka masih jarang dipercaya memegang posisi puncak. Budaya patriarki, stereotip gender, serta penolakan sebagian laki-laki untuk dipimpin perempuan menunjukkan bahwa bias budaya tetap kuat meskipun aturan formal terbuka.

Selain itu, perempuan sering dianggap kurang kompeten atau terlalu emosional, mempertegas bahwa hambatan budaya lebih dominan daripada hambatan struktural. Dalam aktivitas harian, para informan menjalankan peran berbeda dari urusan teknis hingga komunikasi lintas divisi yang menunjukkan dinamika pembagian kerja dalam organisasi.

Masalah waktu menjadi hambatan utama bagi semua gender. Informan 3 dan 6 sama-sama mengalami benturan antara tuntutan akademik dan agenda organisasi, menandakan bahwa manajemen waktu adalah tantangan umum bagi mahasiswa aktif. Hambatan relasional juga muncul, seperti miskomunikasi dan ketidakmerataan akses informasi. Keputusan yang hanya beredar dalam “lingkaran kecil” menciptakan perasaan tidak dilibatkan sepenuhnya.

Di sisi lain, persepsi kemampuan turut membentuk posisi anggota. Informan 1 harus membuktikan diri sebelum dipercaya memegang tugas besar, sementara Informan 5 menyoroti bahwa keberanian berbicara menjadi standar tidak tertulis yang menentukan

pengaruh seseorang. Temuan ini menjelaskan bahwa selain struktur formal, norma informal dan budaya performatif turut memengaruhi distribusi peran dalam politik kampus.

Variasi motivasi para informan menunjukkan bahwa politik kampus bukan ruang tertutup, tetapi terbentuk melalui kedekatan sosial dan peluang yang tersedia. Hal ini selaras dengan konsep *political socialization*, di mana keterlibatan mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Beragamnya jalur masuk para informan menunjukkan bahwa organisasi kampus berperan sebagai pintu awal pembentukan identitas politik.

Perbedaan peran yang diambil informan menggambarkan bahwa struktur organisasi kampus cukup lentur, tetapi kelenturan ini tidak selalu berarti akses yang setara. Temuan dari Informan 4 dan 5 menunjukkan bahwa posisi strategis lebih sering dipengaruhi jaringan informal daripada aturan organisasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya hierarki terselubung dalam politik kampus yang memengaruhi peluang kepemimpinan.

Hambatan manajemen waktu yang dialami para informan

memperlihatkan bahwa politik kampus masih dibatasi oleh tuntutan akademik. Pengalaman Informan 3 dan 6 menunjukkan bahwa organisasi menuntut komitmen besar tanpa dukungan memadai untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dan organisasi, sehingga diperlukan kebijakan institusional yang lebih responsif terhadap beban aktivis mahasiswa.

Hambatan relasional berupa miskomunikasi, sentralisasi informasi, dan keputusan tertutup menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi dalam organisasi. Sesuai teori komunikasi organisasi, pola komunikasi yang tidak merata melemahkan rasa memiliki dan menurunkan efektivitas organisasi. Ketika keputusan hanya berputar pada kelompok kecil, partisipasi anggota menjadi sekadar formalitas.

Selain itu, hambatan terkait persepsi kemampuan menegaskan bahwa budaya performatif masih kuat dalam politik kampus. Informan 1 dan 5 menunjukkan bahwa keberanian berbicara lebih dihargai daripada kualitas kerja, sehingga menimbulkan jarak antara anggota yang vokal dan yang bekerja di balik layar. Kondisi ini menggambarkan bahwa meski politik

kampus tampak inklusif secara formal, praktiknya belum sepenuhnya adil dan setara bagi seluruh mahasiswa.

E. Kesimpulan

Analisis berdasarkan pemikiran Mary Wollstonecraft memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi batasan yang lahir dari norma sosial dan pola pikir lama yang menganggap kepemimpinan sebagai domain laki-laki. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa sebagian mahasiswa perempuan merasa harus "membuktikan kompetensi dua kali lebih banyak" sebelum dianggap layak menduduki posisi strategis.

Di sisi lain, nilai-nilai Islam seperti *rahmah*, *karamah* *insaniyah*, dan *ta'dil* sejatinya mengajarkan kesetaraan harkat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin dalam kontribusi sosial. Ketika nilai-nilai ini tidak terimplementasi sepenuhnya dalam politik kampus, ketimpangan gender menjadi fenomena yang terus berulang.

Informan perempuan menunjukkan berbagai upaya, mulai dari memperkuat kepercayaan diri, aktif berbicara di forum, membangun solidaritas sesama perempuan, hingga menetapkan standar

profesionalisme dalam organisasi. Beberapa strategi juga berbentuk negosiasi simbolik, seperti menjaga citra, memperbaiki cara komunikasi, dan menegosiasikan ruang aman di dalam organisasi.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai agen yang berdaya, meskipun masih bekerja dalam struktur politik kampus yang belum sepenuhnya setara.

Hambatan yang ditemukan meliputi benturan waktu dengan akademik, miskomunikasi internal, penguasaan informasi yang tidak merata, serta adanya standar tidak tertulis yang mengutamakan anggota yang vokal di forum. Selain itu, sebagian informan merasa bahwa pembagian peran tidak selalu adil dan cenderung bergantung pada jaringan informal.

Meskipun begitu, seluruh informan mengakui bahwa politik kampus memberikan manfaat besar seperti pelatihan kepemimpinan, kemampuan negosiasi, manajemen konflik, dan pengembangan kapasitas diri. Artinya, politik kampus tetap menjadi ruang penting, tetapi membutuhkan pemberian untuk menjadi lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. (2025). *Perwujudan kesetaraan gender melalui keterlibatan perempuan dalam organisasi kemahasiswaan (Studi pada Pimpinan Ormawa FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu)*. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Asiah, A. (2023). *Kontestasi kepemimpinan perempuan dalam organisasi mahasiswa: Analisis feminis Fatima Mernissi (Studi terhadap PMII Rayon Ushuluddin UIN Bandung)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Azizah, S., & Tianah, I. (2024). Women's leadership in Madura: Analysis of women's leadership in student organizations at higher education in Madura. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 11(1).
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Hidayati, N. (2023). Gender equality and the spirit of rahmatan lil-'alamin in the Qur'anic perspective. *Jurnal Al-Itqan: Journal of Islamic Studies*, 9(2), 67–84.
- Hirschmann, N. J., & Regier, E. F. (2019). Mary Wollstonecraft, social

- constructivism, and the idea of freedom. *Politics & Gender*, 15(4), 645–668.
- Mernissi, F. (2011). *Beyond the veil: Male–female dynamics in modern Muslim society*. Saqi Books.
- Naisr, S. M. (2024). *Kesetaraan politik perempuan perspektif hadis*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nur, A., et al. (2024). Revisiting Qur'anic visions of equality: A hermeneutical engagement with women's emancipation discourse. *Raushan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 14, 3–8.
- Panagakou, S. (2019). A cry for freedom, justice, and rights: Mary Wollstonecraft on the emancipation of women. *University of Cyprus Journal*, 14.
- Putri, N. (2020). *Persepsi mahasiswa tentang kepemimpinan perempuan di organisasi mahasiswa*. Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang.
- Rahmawati, N. (2023). *Kesetaraan gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara teori konflik sosial dan teori struktural fungsional*. Institut PTIQ Jakarta.
- Suryani. (2022). Barriers to women's leadership in student organizations.
- Gender Equality Studies Journal*, 12(3), 201–214.
- Toyibah, D. (2022). Habitus, agency and political participation of female students: A study at an Islamic university in Indonesia. *HubsAsia: Journal of Southeast Asian Studies*, 21(2), 45–58.
- White, S., et al. (2024). Voting against women: Political patriarchy, Islam, and representation in Indonesia. *Politics & Gender*, 20(2), 391–421.
- Wollstonecraft, M. (2015). *A vindication of the rights of woman*. Penguin Classics.